



LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS)
DI ERA PANDEMI COVID 19 DI
DKI JAKARTA**

Oleh :

Prof. Dr. BUDIHARJO, M.Si.

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (BKKKS) DI ERA PANDEMI COVID 19
DI DKI JAKARTA**

Telah disetujui pada tanggal : Agustus 2020

Ketua Program
Magister Ilmu Administrasi

Kapuslitdianmas

Dr. Harry Nenobais, M.Si.

Dr. Franky, MM

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Paiman Raharjo, MM., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Pembatasan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kerangka Pemikiran	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Implementasi	12
B. Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi (Reintegrasi)	41
1. Pengertian	41
2. Gambaran Mengenai Disorganisasi dan Reorganisasi	45
3. Ketidakserasian Perubahan-perubahan dan Ketertinggalan Budaya (<i>Cultural Lag</i>)	47
C. Arah Perubahan (<i>Direction of Change</i>)	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
B. Desain Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
D. Sumber Data dan Informan	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisa Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Deskripsi Obyek Penelitian Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta	62
2. Data Fokus Penelitian : Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) di Era Pandemi Covid 19 di DKI Jakarta.....	76
B. Pembahasan.....	77
1. Aspek Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) di Era Pandemi Covid 19 di DKI Jakarta.....	77
2. Aspek Kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta.....	78
3. Aspek Kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta.....	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal dan Prosedur Pelaksanaan Penelitian	54
Tavel 3.2 Sumber Data dan Informan.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kebijakan Publik	14
Gambar 2.2. Proses Implementasi	15\
Gambar 2.3. Pemikiran Manajemen Strategis	17
Gambar 2.4. Model Proses Implementasi Kebijakan.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden RI Joko Widodo memberikan pernyataan pers pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar **Rp 405,1 triliun**.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.

Initial Responses

1. Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN).
2. Pada 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu.
3. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung.

4. Kemkes mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara *World Health Organization* (WHO).
5. Kemkes membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait Covid-19.
6. Pada 2 Februari 2020, Pemri mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB. Pada 4 Februari 2020, Pemri menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan.
7. Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT. Langkah-langkah sebelumnya yang ditempuh antara lain:
 - a. Ketersediaan akses logistik di Wuhan. Bantuan dana setara Rp 133 juta kepada WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa.
 - b. *BNPB melalui Kemlu dan KBRI Beijing mengirimkan masker N-95 untuk WNI di RRT.*
8. *Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease** 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.*

Bidang Kesehatan (senilai Rp 75 triliun)

1. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
2. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: *test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer* dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. *Upgrade* 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
4. Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.

5. Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta.
6. Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.

Bidang Sosial (senilai Rp 110 triliun)

1. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.
2. PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
3. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000,- selama 9 bulan (naik 33 persen)
4. Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta.
5. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
6. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.

Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (senilai Rp 70,1 triliun)

1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.
2. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%.
3. Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
4. Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

5. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
7. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
8. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor

1. Penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor
2. Penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor)
3. Percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun

1. Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
2. Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
3. Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.
3. Pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang membawa penumpang. Jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek, akan dibagikan sembako senilai Rp 200 ribu per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan Rp 600 ribu per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan.

Bidang Hukum

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

Kebijakan/Fasilitas Lainnya

1. Pemerintah membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi Covid-19 di Pulau Galang. Kapasitas ini terdiri dari 1.000 tempat tidur. Fasilitas ini siap pada 6 April 2020.
2. Pada 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan peralatan medis portable. Fasilitas ini mampu menampung sampai dengan 3.000 tempat tidur.

Kesejahteraan sosial adalah tugas utama bagi pemerintah dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat serta peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, bahwa penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial telah diatur dengan kebijakan public dibidang kesejahteraan sosial. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fakta yang tak terbantahkan seiring dengan kondisi pandemic Covid 19 di Indonesia lambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi, dimana akses terhadap penguasaan ekonomi semakin terasa berat bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebagai salah satu masalah utama, menangani permasalahan PMKS harus dengan cara komprehensif maka penanganannya dilakukan dengan 7 cara yaitu, preventif, kuratif, rehabilitatif, perlindungan, penunjang dan pengembangan serta rujukan. Implementasi kebijakan perundang undangan No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan dalam penanganan meluasnya wabah pandemic Covid 19, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah kebijakan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah Daerah dibidang Kesejahteraan sosial selalu membantu kegiatan social dalam rangka ikut mengatasi permasalahan warga berdampak Covid 19 baik di masa normal maupun dimasa pandemi Covid 19. Adapun pelayanan umum dibidang sosial. meliputi Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial. Dari kondisi awal para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terganggu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, saat ini ditambah dengan situasi yang kurang mendukung karena maraknya wabah penyakit corona atau Covid 19. Hal ini sudah barang tentu para pekerja sosial di Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta harus melakukan pelayanan social dengan menggunakan relawan sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bertambahnya anak jalanan (anjol), anak telantar, gelandangan-pengemis (gepeng), wanita rawan sosial, penyalahgunaan napza, lansia telantar, penyandang cacat serta banyak lagi yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akibat Covid 19.
2. Bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemic Covid 19 sehingga menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
3. Belum siapnya sistem dan pola penanganan wabah pandemic Covid 19 oleh pemerintah dan masyarakat dalam mmengatasi maslah Covid 19.

C. Perumusan Masalah

Dari gambaran tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran organisasi Badan Koordinasi dan Kegiatan kesejahteraan sosial DKI Jakarta dalam melakukan pelayan sosial kepada Penyandang masalah sosial.
2. Bagaimana peran relawan sosial BKKKS dalam merlksanakan pelayanan kemanusiaan dalam era pandemic corona atau Covid 19.
3. Bagaimana kerjsasama BKKKKS dengan pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pelayanan sosial bagi warga masyarakat berdampak di era pandemic Covid 19.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan kesehatan Covid 19 adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganaan Covid 19 di Badan koordinasi dan Kegiatan Kesajahteran Sosial (BKKKS) DKI Jakarta DKI Jakarta.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Penyelenggaraan dan Penanganan layanan Kesejahteraan Sosial oleh BKKKS DKI Jakarta.
2. Mengetahui dan menggambarkan hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dalam masa Covid 19.
3. Mengetahui dan menggambarkan upaya dalam mengatasi hambatan pelayanan sosial oleh BKKKS DKI Jakarta dalam masa pandemic Covid 19.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk memperkuat pengembangan ilmu Administrasi Publik di Program Pasca sarjana UPDM(B) serta menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan dukungan kontribusi dari segi keilmuan dan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya. Dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam penanganan masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan untuk pembangunan intelektual di bidang akademis sehingga mampu menerapkan teori-teori yang ada dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata.
- b. Bagi kampus, untuk menambah kepustakaan Program Pascasarjana UPDM (B)
- c. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangsaran pikiran bagi BKKKS DKI Jakarta dalam dan Penanganan warga berdampak Covid di masa bencana.

G. Kerangka Pemikiran

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau korban bencana Covid 19 merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi secara umum, PMKS merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar baik karena kondisi ekonomi sosial atau wabah penyakit secara massal. Sudah banyak kebijakan publik yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan penyandang masalah sosial, namun kondisi saat ini kebijakan publik yang dikeluarkan bersama dengan pandemic wabah corona yang melanda bangsa bahkan belahan dunia, yaitu Covid 19. Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoritik beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi Edward III dalam Suharno (2013: 148) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi intensif tentang kebijakan yang dimaksud Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana. Tanpa sumber daya yang memadai tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya sumber daya kebijakan hanya akan menjadi sia-sia.
3. Disposisi Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Pelaksana seperti adanya komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi yang dimiliki oleh Pelaksanan menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila Pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus menghadapi dan kandas ditengah jalan ataupun salah sasaran karena perilaku dari pelaksana kebijakan.
4. Struktur organisasi Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standar Operational Procedures* atau SOP). SOP seperti pola penanganan Covid 19 melalui jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan dasar hukumnya (UU, Keppres, Kepmen, Perda, dsb.). Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU yang melibatkan berbagai sektor, organisasi, prosedur, dan teknik kerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program-program. Pada sisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udji dalam Abdul Wahab (1991) mengemukakan, "Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar atau berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan".

Kendati implementasi kebijakan itu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap implementasi dalam proses kebijakan dimaksud. Kurangnya perhatian pada implementasi kebijakan menyebabkan adanya semacam "*mata rantai yang hilang*" antara tahap perumusan dan evaluasi kebijakan. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini baru mampu mengesahkan kebijakan, dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diinginkan. Gejala inilah yang menurut Andrew Dunsire (Abdul Wahab, 2001) sebagai "*implementation gap*" yaitu suatu keadaan dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesenjangan atau

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari implementasi kebijakan itu.

Besar kecilnya perbedaan antara harapan dengan kenyataan itu bergantung pada "*implementation capacity*" dari organisasi/instansi atau aktor yang dipercaya mengimplementasikan kebijakan dimaksud. *Implementation capacity* ini adalah kemampuan aktor/organisasi untuk melaksanakan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam kenyataannya setiap kebijakan publik mengandung resiko kegagalan. Hogwood and Gunn (1986) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori, yaitu "*nonimplementation*" (tidak dapat dilaksanakan) dan "*unsuccessful implementation*" (pelaksanaan yang kurang berhasil). Contoh yang pertama adalah kebijakan Menteri Keuangan RI (di zaman Orba) yang mengenakan pajak 5% untuk penukaran rupiah ke US\$, yang ternyata tiga hari kemudian dicabut kembali. Contoh yang kedua adalah implementasi kebijakan pemungutan retribusi televisi yang pelaksanaannya tersendat-sendat.

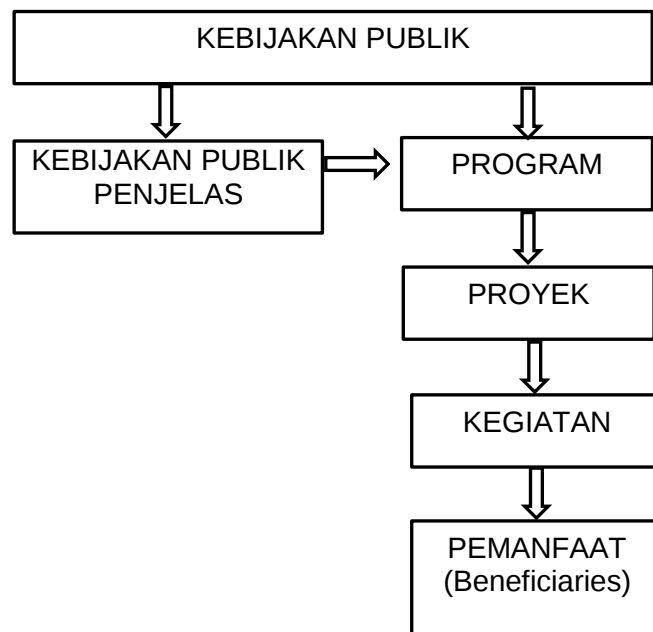
Secara umum, tugas implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan dimaksud yang berupa hasil kebijakan (*policy outcomes*). Untuk itu, perlu diciptakan suatu sistem, yang dengan sistem itu diharapkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan, dengan cara menerjemahkan tujuan kebijakan yang luas itu ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan. Dengan demikian, maka untuk mencapai tujuan itu perlu diciptakan berbagai macam program.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, dan

kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik dimaksud.

Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll. Sedangkan kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan penjas yang sering disebut peraturan pelaksanaan yang merupakan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

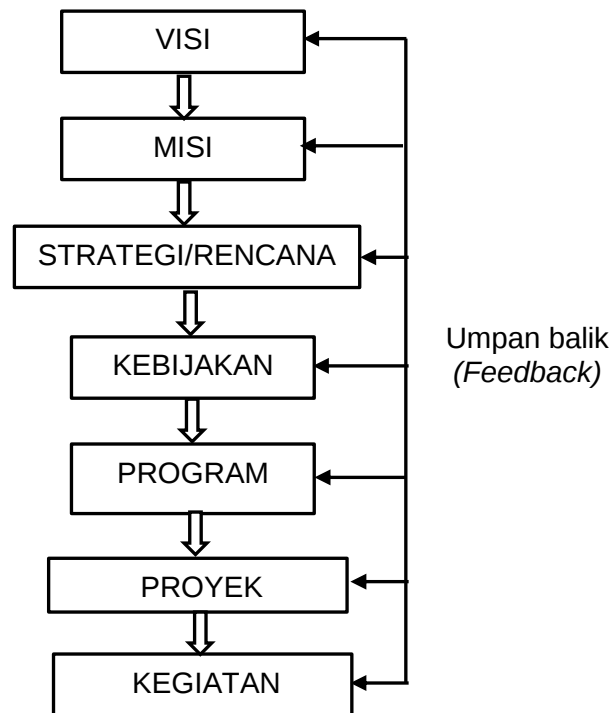
Adapun rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program ke proyek dan ke kegiatan yang pad akhirnya diperoleh manfaat dari kebijakan publik dimaksud.



Gambar 2.1. Kebijakan Publik

Sumber : Riant Nugroho, 2012:675

Sementara dengan mengikuti manajemen sektor publik, secara lengkap dapat digambarkan proses implementasi dimaksud sebagai berikut:



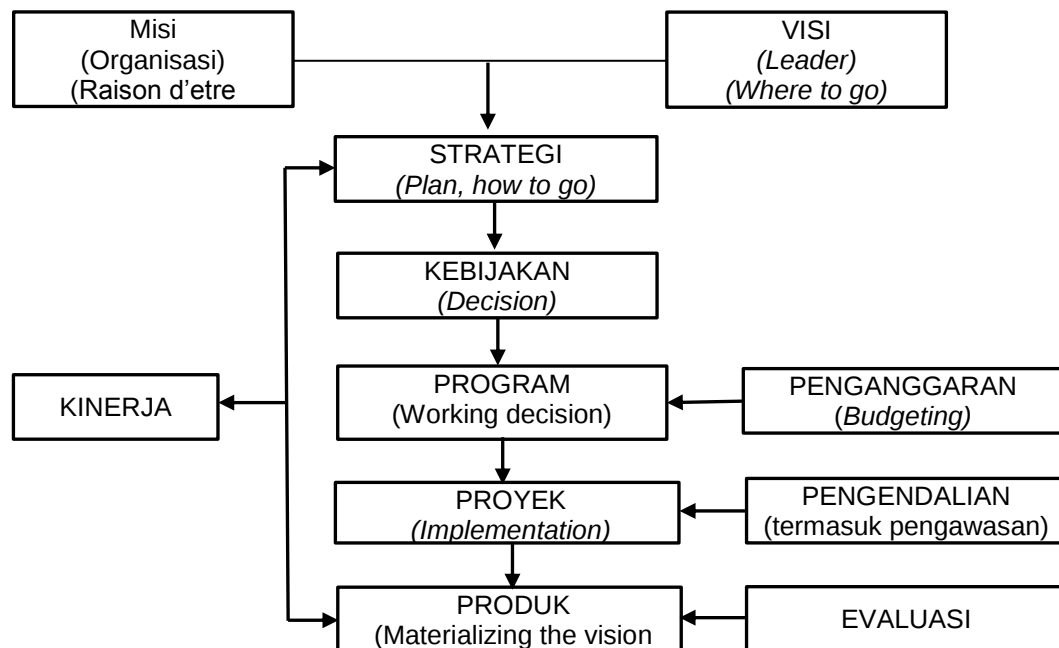
Gambar 2.2. Proses Implementasi

Pemahaman tentang manajemen kebijakan publik itu perlu dikemukakan mengingat sebagian besar Perencanaan Strategis (Renstra) di Indonesia atau pada sejumlah buku teks, visi adalah yang pertama dan dijabarkan dalam misi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sementara strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Memang dalam beberapa literatur termasuk pendapat Riant Nugroho (2012: 677-678), visi itu bukan yang pertama, dan dijabarkan dalam misi. Justru yang pertama adalah misi karena misi adalah tujuan melekat setiap organisasi sampai organisasi ini bubar kelak. Misi organisasi memberikan acuan kepada pemimpin untuk merumuskan visi yang sesuai dengan kapasitas pemimpin tersebut untuk membuat *mission accomplished* melalui kapasitas dan keunggulan yang dimilikinya, sementara visi melekat pada leader. Para pemimpin merumuskan visi selama kurun waktu ia bekerja. Kombinasi antara misi (organisasi) dengan visi (pemimpin) tertuang dalam bentuk strategi.

Penjabaran misi adalah strategi atau rencana. Strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan dan dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat publik maupun nonpublik. Jadi, kebijakan publik dapat dikatakan “keputusan politik” terhadap pilihan atas strategi. Tanpa keputusan politik, strategi hanya tinggal konsep di atas kertas. Kebijakan ini dioperasionisasikan dalam bentuk program-program yang berjalan paralel dengan itu, seperti penganggaran program. Program dirinci dalam proyek-proyek yang implementasinya dalam bentuk “produk” baik berupa barang maupun pelayanan. Istilah produk juga sering diganti dengan “kegiatan” namun sengaja tidak digunakan karena ada output berupa *intangible product* yaitu jasa, dan *tangible* yaitu produk.

Adapun paparan pemikiran manajemen strategis di awal dan pemahaman lanjutan digambarkan dalam bagan di bawah ini. (Riant Nugroho, 2012:679):



Gambar 2.3. Pemikiran Manajemen Strategis

Sumber: Riant Nugroho, 2012:679.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan lagi menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan, merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan hasilnya adalah “produk” yang merupakan “materialisasi” dari misi.

Konsep implementasi dan pengendalian kebijakan publik lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan merupakan mata rantai perlengkapan dalam proses kebijakan publik.
2. Kebijakan publik yang telah disahkan dan dicantumkan dalam Lembaran Negara/ Daerah siap untuk dilaksanakan.
3. Kebijakan publik ada yang *self executing* (dengan sendirinya telah terimplikasikan begitu suatu kebijakan publik ditetapkan) seperti misalnya pengaturan kedaulatan suatu negara. Jumlah kebijakan publik yang *self executing* ini relatif sangat sedikit.

4. Umumnya kebijakan publik adalah *nonself executing* harus dilaksanakan dan dikendalikan oleh yang berwenang yang terdiri dari berbagai pihak, terutama lembaga eksekutif, birokrat, dan badan-badan pemerintah serta badan-badan legislatif (DPR/DPRD), yudikatif (MA, MK, KY) dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat.
5. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditujukan agar tujuan dikeluarkannya dapat segera tercapai dengan dampak negatif sedikit mungkin.
6. Adapun prinsip kebijakan publik adalah : Sifat kebijakan publik adalah *self executing* atau *nonself executing*.
7. Yang bertanggung jawab adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, badan-badan pemerintah/lembaga negara, asosiasi perusahaan swasta dan pemerintah, LSM dan masyarakat.
8. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik dilakukan secara simultan.
9. Orientasi pada sasaran dan tujuan serta target group dari kebijakan publik.
10. Efektif, efisien dalam penggunaan sumber daya.
11. Berdasarkan prosedur dan tatalaksana pelaksanaan yang ditetapkan.
12. Tertib administrasi dan tertib hukum.
13. Akuntabilitas pelaksanaan.

MODEL PROSES IMPLEMENTASI

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2012:158-172) menawarkan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*).

Ukuran-ukuran dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan kebijakan secara menyeluruh. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan ini pun akan merupakan bukti yang dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Misalnya, pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran dengan membuat beberapa proyek padat karya. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu ditentukan jumlah pekerjaan dan kemajuan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan.

Dalam banyak kasus, memang akan ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebabnya:

1. Mungkin bidang programnya yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks;
2. Mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi- kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Kadangkala kekaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sengaja pula diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang disertai tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain atau sistem penyampaian kebijakan.

Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh hasil penelitian.

Sumber-sumber Kebijakan

Yang layak mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber dimaksud

mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek, sering terdengar para pejabat pimpinan atau pelaksana mengatakan bahwa tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Demikianlah maka dalam beberapa kasus, kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan. Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu sangat penting memberi perhatian pada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan dasar yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tanpa kejelasan, bisa berakibat para pelaksana tidak mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu, sehingga kebijakan akan mengalami kegagalan.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan (*message*) ke bawah dalam suatu organisasi atau dari organisasi ke organisasi lainnya (unit kerja), baik sengaja atau tidak, bisa saja para komunikator salah atau menyimpangkannya serta menyebarkannya, sehingga para pelaksana menghadapi kesulitan. Demikian juga jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Implementasi kebijakan yang berhasil seringkali memerlukan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi para pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong para pejabat pelaksana (bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

kebijakan. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai pengaruh karena posisi hierarkis mereka. Para pejabat atasan mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari:

1. Rekrutmen dan seleksi;
2. Penugasan dan relokasi;
3. Promosi (kenaikan pangkat dan jabatan);
4. Pemberhentian (pensiun, pemecatan).

Di sinilah peran atasan yang memiliki kontrol atas alokasi anggaran belanja pada biro-biro pemerintah dan kantor-kantor daerah yang dapat ditingkatkan ataupun dikurangi. Mereka juga memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, dua tipe pelaksanaan merupakan hal yang penting :

1. Nasihat dan bantuan teknis. Para pejabat tinggi seringkali melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan membantu para pejabat bawahan menginterpretasikan aturan-aturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menyusun tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan dan berguna dalam melaksanakan kebijakan;
2. Penghargaan dan sanksi (*reward and funishment*). Para pejabat tinggi dapat menerapkannya kepada para pejabat bawahan atau pelaksana, dalam arti pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi, dan hukuman bagi mereka yang bersalah. Hal ini dapat menunjuk pada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan koersif. (Budi Winarno, 2012:163).

Penggunaan kekuasaan-kekuasaan normatif dan numeratif paling umum. Misalnya di Amerika Serikat (AS), pemerintah federal berusaha memengaruhi kegiatan pemerintah negara bagian melalui alokasi dan manipulasi ganjaran-ganjaran simbolik dan materi. Ini dilakukan melalui sosialisasi, persuasi, dan kooptasi para pejabat pemerintah negara bagian dan daerah. Dengan mencoba membangun aliansi profesional sekitar organisasi dan misinya, para pejabat pemerintah federal berusaha

melindungi sekutu-sekutunya yang akan menjadi pelaksana implementasi kebijakan mereka dengan sepenuh hati.

Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Pembahasan masalah ini tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari personil mereka. Perhatian juga perlu ditujukan pada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran serta-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Meter dan van Horn (Budi Winarno, 2012:166) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan- keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka" yang diartikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang dampaknya pada kebijakan publik menjadi pusat perhatian selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

Sekalipun memang dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil, namun mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Meter dan van Horn mengajukan usul pertimbangan dengan beberapa pertanyaan tentang lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi yurisdiksi atau organisasi yang di mana implementasi kebijakan itu dilaksanakan, yaitu:

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
4. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana, dan apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Pemahaman pelaksana akan tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan dimaksud secara menyeluruh. Ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering disebabkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti ini persepsi individu memegang peran. Ketidaksesuaian kognitif individu, mungkin akan berusaha menyimpangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi

kebijakan tersebut, yaitu : Tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan- hubungan, yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini maka kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan yang men-dasari tindakan-tindakan tersebut.

Demikianlah, maka intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Jika demikian halnya, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan mungkin menolak untuk berperanserta dalam program tersebut sama sekali, atau mengelak secara sembunyi-sembunyi. Di sinilah peran pengawasan dan pelaksanaan menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Itulah sebabnya para pengkaji implementasi kebijakan hams mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur-unsur yang cenderung beragam.

Kaitan antara Komponen-komponen Model

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang akan memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Dengan demikian studi implementasi yang dilakukan secara longitudinal menjadi sangat penting di mana hubungan-hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kausal pada periode waktu lainnya. Hal ini akan mampu mendeskripsikan dan membenarkan secara singkat mengenai beberapa hubungan yang dihipotesiskan sebelumnya.

Meter dan van Horn membuat kaitan (*linkages*) yang dibentuk antara sumber-sumber kebijakan dengan tiga komponen lainnya (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan-badan pelaksana, serta kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik). Menurut mereka tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan memengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lainnya hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana dapat dicapai hanya jika sumber-sumber yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Kecenderungan para pelaksana dapat dipengaruhi secara langsung oleh tersedianya sumber-sumber. Jika jumlah uang atau sumber-sumber lain dipandang tersedia, maka para pelaksana mungkin memandang program dengan senang hati dan kemungkinan besar akan mendorong ketaatan mereka karena berharap memperoleh keuntungan dari sumber-sumber tadi. Sebaliknya jika suatu program tidak mempunyai cukup sumber-sumber pendukung dan prospektif, maka dukungan ketaatan para pelaksana terhadap program akan menurun.

Demikianlah, kaitan antara sumber-sumber dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana menunjukkan bahwa tersedianya sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber lain mungkin akan menimbulkan tuntutan (oleh warga negara, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi) untuk peranserta dalam implementasi program berhasil. Faktor ini juga akan mendorong kelompok-kelompok yang pasif untuk berperanserta dalam implementasi kebijakan. Dengan perkataan lain, motivasi mencari keuntungan dari sumber-sumber yang tersedia akan mendorong para pemeranserta baru di dalam proses implementasi kebijakan. Namun jika sumber-sumber yang tersedia sangat terbatas, para warga negara individual dan kepentingan-kepentingan yang terorganisasi akan memilih jalan menentang kebijakan berdasarkan perbandingan nilai keuntungan yang didapat dengan biaya yang harus dibayar. Contohnya, para pejabat publik

di daerah akan menolak peraturan yang mengurangi nilai otonomi dan sebaliknya akan mendukung segala macam kebijakan yang menguntungkan kedudukannya di daerah.

Meter dan Horn pun mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan memengaruhi karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan capaiannya itu sendiri. Kondisi-kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas, dan keahlian yang ada dalam badan-badan administratif maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki.

Jika variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memengaruhi implementasi kebijakan, maka hal ini juga berlaku untuk variabel-variabel yang lain. Beberapa karakteristik dari badan-badan pelaksana mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan-kecenderungan para personil yang ada di dalamnya. Sifat jaringan kerja komunikasi, tingkat pengawasan hierarkis, dan gaya kepemimpinan dapat memengaruhi identifikasi individu terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Apakah pengaruh yang ditimbulkannya mempermudah atau menghalangi implementasi yang efektif bergantung pada orientasi dari badan pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan individu pelaksana kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan formal dan tidak formal dari badan itu dengan badan “pembentuk kebijakan” atau badan “pelaksana kebijakan” (misalnya, apakah mereka melakukan kegiatannya pada tingkat pemerintahan yang sama? Apakah suatu aliansi yang efektif telah terbentuk antara penguasa tinggi dan para pejabat pelaksana?).

Masalah Kapasitas

Meter dan Horn juga menyinggung kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Menurut mereka, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi

pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau waktu yang tidak memungkinkan.

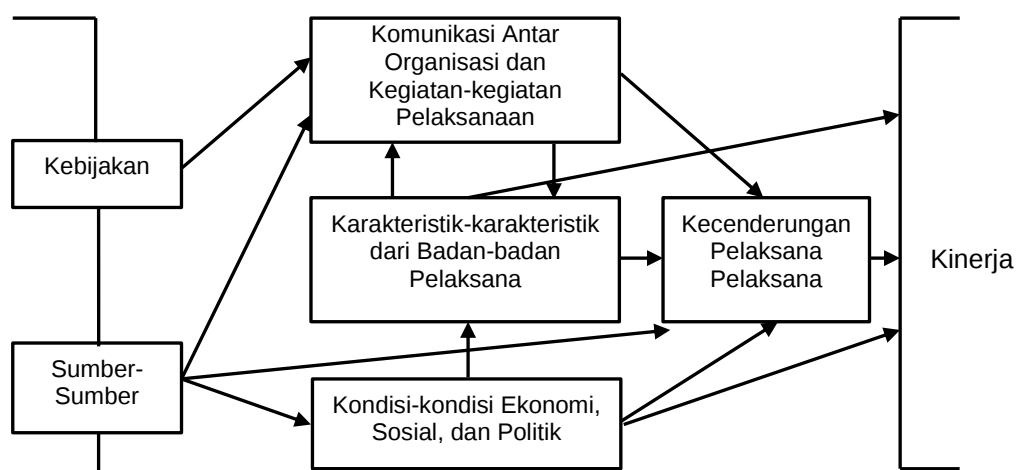
Masalah kapabilitas ini disoroti dalam empat komponen model, yakni: Sumber-sumber kebijakan (sifat dan kuantitas mereka); komunikasi antarorganisasi, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (penyediaan dukungan politik, nasihat, dan bantuan teknis); karakteristik-karakteristik dari badan-badan pelaksana (kompetensi staf, kepemimpinan, vitalitas, ikatan-ikatan formal dan tidak formal terhadap para pembuat kebijakan); dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (opini publik, kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi, kondisi-kondisi ekonomi dari yuridiksi).

Model proses implementasi kebijakan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Ukuran-ukuran

 Dasar dan Tujuan-tujuan



Gambar 2.4. Model Proses Implementasi Kebijakan

Sumber : Budi Winarno, 2012:160.

TEKNIK/METODE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Hierarki dan Kategori Kebijakan Publik.

Teknik/metode pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditentukan oleh hierarki dan kategori kebijakan publik :

Hierarki:

Lazimnya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutnya adalah :

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat).

UU/PERPPU (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

Peraturan Pemerintah (PP).

Peraturan Presiden (Perpres).

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Kategori kebijakan:

Substantive atau Procedural Policies.

Misalnya kebijakan luar negeri, perdagangan, perburuhan, pendidikan, energi, kesehatan, pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan, dsb.

Distributive Policies, Redistributive Policies, Regulatory Policies. Self Regulatory Policies.

Contoh distributive policies: Bea siswa, subsidi, tax holiday, dll.

Contoh *Redistributive policies*: Land reform, PIR, pemberian tanah kepada transmigran, dll.

Contoh *Regulatory policies* : Larangan-larangan dan pembahasan (kebijakan *tree in one* lalu lintas, batas kecepatan berkendara di jalan tol, kepemilikan senjata api tanpa izin, dll.

Contoh Self Regulatory Policies : Pemberian surat izin kerja, tarif dasar listrik, dll.

Material atau Symbolic Policies.

Contohnya UMR, KPR, larangan menginjak rumput di taman, iuran tv, konversi hutan, dll.

Collective (Public) Goods dan Private Goods Policies

Barang-barang publik (*public goods*) adalah barang-barang yang dalam mengkonsumsinya oleh seseorang/ sekelompok orang tidak bisa menghalangi/ melarang orang/kelompok lain untuk juga mengkonsumsinya. (LAN, 2009:102).

Untuk dapat menghalangi seseorang/sekelompok orang lain dalam mengkonsumsi/menikmati barang-barang publik tersebut biayanya sangat mahal. Demikian juga *nonrivalry*, artinya tidak ada persaingan antar konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang publik tersebut, karena dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa halangan, dan yang penting tidak akan mengurangi ketersediaannya untuk dinikmati oleh orang-orang lainnya. *Public Goods* (Barang-barang Publik) ada yang murni (*pure public goods*) dan ada yang tidak murni (*nonpublic goods*).

Contoh *Public Goods*: Mercusuar (*lighthouse*), yang tidak mungkin menghalangi kapal-kapal yang lewat di sekitar yang diteranginya untuk memanfaatkannya (*nonexcludable*). Demikian juga taman kota yang dinikmati oleh seseorang/sekelompok orang, dan tidak mengurangi ketersediaannya untuk dinikmati oleh masyarakat lainnya (*nonrevalry*). Barang-barang publik itu ada dua macam, yaitu barang-barang publik murni (*pure public goods*), dan barang-barang publik tidak murni (*non-public goods*).

Contoh *Collective (Public) Goods*: Pengadaan barang-barang publik biasanya oleh pemerintah. Sebagian dari APBN, seperti pengadaan mili-ter dengan peralatannya, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, transportasi, hukum dan penegakkan hukum (*law and orders*).

Dalam dunia nyata, hampir tidak ada "*pure public goods*" karena dalam kemajuan ilmu dan teknologi (high technology di dunia modern), misalnya mercu suar pun bisa diberi kode, seningga kapal-kapal tertentu saja yang memiliki perangkat pembaca yang bisa menggunakannya. Jadi, *nonrivalry* dan *nonexcludability*) itu tidak berlaku jika tidak ada tambahan biaya yang ditimbulkan untuk konsumsi barang publik tersebut oleh konsumen lainnya.

Kaitan dengan peran pemerintah dalam penyediaan barang publik, terdapat dua jenis, yaitu "*pure public goods*" (murni) dan "*semi public goods*" (semi murni). Namun semi *public goods* sering disebut juga *pure public goods* yang diperluas. Kategori barang-barang publik murni seperti pertahanan, hukum, dan penelitian (basic research). Barang-barang publik semi murni seperti pendidikan, kualitas lingkungan hidup, transportasi, dan semi yang luas "*community and regional development*". Intinya di sini adalah jika dapat dilakukan "*partial exclusion*", maka dapat dikategorikan sebagai barang-barang publik yang diperluas.

Sementara itu privat goods adalah semua barang publik yang untuk menikmatinya harus mengeluarkan biaya (*excludable/revalary*), seperti restoran, tempat hiburan, perumahan, sekolah/ perguruan tinggi, jalan tol dsb. Barang-barang privat dikonsumsi secara individu dan dapat dipisahkan antara yang membeli dan yang tidak. Liberal dan *Conservative Policies*.

Misalnya kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan di bidang kesejahteraan rakyat.

Urutan Langkah Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan :

Sosialisasi dan diseminasi kebijakan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang adanya kebijakan tertentu. Pembentukan organisasi pelaksanaan :

- Pembagian tugas pokok dan fungsi;
- Penyusunan lembaga/unit kerja;
- Tata kerja dan petunjuk pelaksanaan;
- Koordinasi.

Penyusunan Program Kerja dengan memperhatikan :

- Hierarki kebijakan publik;
- Kategori kebijakan publik;
- Sistem dan proses pengelolaan kebijakan publik;
- Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika dan proses pembuatan kebijakan publik dan pelaksanaannya;
- Pemahaman terhadap masalah yang perlu dipecahkan melalui kebijakan publik;
- Rincian program kerja;
- Volume target;
- Sumber daya dan besarannya :
 - Sumber daya alam;
 - Sumber daya manusia;
 - Sumber dana.
- Waktu dan jaringan kerja (*networking*) pelaksanaan (Barchart, Network Planning, dll.)
- Prasarana dan sarana.

Pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan untuk:

- Pengendalian;
- Bahan evaluasi;
- Bahan pertanggungjawaban.

Esensi Pelaksanaan Kebijakan:

Pelaksanaan kebijakan merupakan mata rantai penting dalam proses kebijakan publik.

Pelaksanaan kebijakan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh :

Instansi pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif);

Perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD) dan swasta (PT,

CV, Firma, UD, dll.

Asosiasi-asosiasi perusahaan;

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Masyarakat;

Perorangan.

Pelaksanaan kebijakan konstitutif dapat berupa :

Kebijakan deklaratif;

Operasional.

Dampak pelaksanaan kebijakan dirasakan oleh :

Lingkungan luas;

Lingkungan terbatas.

Pelaksanaan kebijakan dapat berupa :

Perbuatan hukum;

Bukan perbuatan hukum.

Pelaksanaan kebijakan harus memahami paradigma, visi, misi, dan nilai-nilai/norma yang menjadi dasar penetapan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu mata rantai kebijakan yang mencakup:

Formulasi kebijakan;

Legislasi dan adopsi kebijakan;

Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan;

Monitoring dan evaluasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan selalu ada perubahan dinamis dari *demand* (kebutuhan) para *stakeholders* yang akan berdampak pada aspek waktu, prasarana dan sarana, serta sumber daya yang digunakan.

Aspek-aspek Pokok dalam Pelaksanaan dan Pengendalian:

Penganggaran :

Sangat sedikit kebijakan publik yang pelaksanaannya tidak memerlukan dana. Bahkan di semua bidang hampir semuanya memerlukan dana (ipoleksosbudhankamag);

Proses penyusunan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dapat sederhana, tetapi juga bisa kompleks, melibatkan berbagai instansi terutama Kementerian Keuangan, BAPPENAS, instansi sektoral penang-gung jawab dan instansi terkait pada tingkat nasional. Rencana program dan pelaksanaan kebijakan beserta besaran anggarannya diusulkan oleh Presiden ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, yang kemudian ditetapkan berupa UU-APBN;

Budget Execution (pelaksanaan anggaran) setelah ditetapkan, sepenuh-nya menjadi tanggung jawab instansi pelaksana. Tergantung dari jenis kebijakan, satu jenis kebijakan dapat dilaksanakan oleh satu instansi atau beberapa instansi;

Besar dan struktur anggaran telah dapat menunjukkan gambaran yang baik mengenai program-program pelaksanaan dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan untuk anggaran tahun bersangkutan baik untuk pelaksanaan kebijakan publik yang telah ada sebelumnya maupun yang baru ditetapkan pada tahun sebelum tahun anggaran dirumuskan;

Efektifitas dari kebijakan publik sangat tergantung dari jumlah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut; Proses penganggaran memberikan kepada Presiden, DPR, dan lembaga pengawasan keuangan suatu kesempatan untuk mengadakan review secara periodik, disebabkan oleh dinamika

sosial ekonomi politik yang pada waktu membuat program pelaksanaan belum diperhitungkan.

Pelaksana Kebijakan:

Lembaga Eksekutif: Presiden dan semua jajarannya (menteri-menteri kabinet dan aparat birokrasi bawahannya baik di pusat maupun di daerah) dan lembaga-lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Termasuk di dalamnya Kepolisian, kejaksaan dan instansi-instansi pengawasan intern dan ekstern;

Lembaga Legislatif (DPR dan DPRD): Melakukan kontrol terhadap kebijakan publik;

Lembaga Yudikatif: Kekuasaan kehakiman (MA, MK, KY);

Pressure Group (kelompok penekan) : Konvensi-konvensi, dewan, atau asosiasi perusahaan-perusahaan, partai politik, Komnas HAM, ICW, Organda, Asosiasi Tekstil, dsb.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti : KPA (Komisi Pembaharuan Agraria), CSIS (*Central Strategic for Indonesia Studies*), pencinta lingkungan hidup, lembaga-lembaga penegak demokrasi, dsb. Perorangan yang patuh pada peraturan perundangan atau tidak.

Proses Administrasi:

Dimaksudkan sebagai operasionalisasi sistem administrasi sepanjang waktu. Aspek-aspek dalam proses administrasi dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik meliputi:

Organisasi Administrasi:

Instansi pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, meliputi struktur, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawabnya;

Politik Administrasi :

Lembaga pada semua instansi akan efektif jika didukung (*support*) oleh berbagai kekuatan partai politik. Aspek-aspek politik dalam administrasi pelaksanaan kebijakan publik antara lain :

Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 Pimpinan instansi;
 Supervisi dan sistem legislatif;
 Badan peradilan;
 Instansi lain yang terkait;
 Pemerintah (pusat) dan Daerah;
Interest groups;
 Partai politik.

Administrasi Policy Making:

Kendati suatu instansi terlibat sejak awal dalam pembuatan kebijakan, tetapi setelah kebijakan itu ditetapkan, maka instansi tersebut harus membuat kebijakan pelaksanaannya, antara lain:

Kebijakan operasional (juklak, juknis);
 Ajudikasi;
Law enforcement;
 Program operations.

Kepatuhan Masyarakat:

Kebijakan publik yang telah ditetapkan hendaknya dipatuhi oleh seluruh masyarakat (stakeholders). Banyak faktor yang mempengaruhi apakah masyarakat mentaati kebijakan dimaksud atau tidak (misalnya kebijakan tentang RTRW, larangan menyimpan senpi tanpa izin, larangan perjudian dalam segala bentuknya, aturan berjualan untuk K-5, dsb.). Faktor-faktor dimaksud adalah :

Patuh :

Sadar dan menghayati tujuannya;
 Legitimate (resmi, berkekuatan hukum);
 Takut akan sanksi jika melanggar;
Self interest;
 Mensupport kebijakan yang ditetapkan;
 Kebijakan telah berjalan lama, dsb.

Tidak patuh karena:

Kebijakan yang ditetapkan bertentangan dengan norma-norma kelompok tertentu;

Kebijakan dirasa tidak adil;

Ada kelompok yang tidak respek terhadap kebijakan yang ditetapkan sehingga memengaruhi masyarakat/kelompok lain.

Teknik Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan :

Pengendalian kebijakan publik dilakukan sejalan dengan pelaksanaan program pengendalian yang dibuat sejalan dengan program pengendalian;

Penunjukan organisasi pengendalian dalam instansi pelaksanaan. Organisasi ini umumnya terdiri dari unit kerja perorangan untuk intern tetapi dapat juga dari luar instansi (yaitu BPKP) atau dari luar lembaga eksekutif (seperti DPR dan BPK). Pemahaman pengawasan dan pengendalian, yaitu :

WAS : DAL + TK

DAL : WAS + TK

(WAS = Pengawasan; DAL = Pengendalian; TK = Tindakan Koreksi). Dua pemahaman ini dapat benar kedua-duanya, tetapi dalam birokrasi kita yang umum dipakai adalah $DAL = WAS + TK$. Hal ini dilakukan oleh para menteri/pimpinan LPNK atas dasar hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal (Irjen), dan para menteri/pimpinan LPKN melakukan koreksi yang pelaksanaannya oleh para Direktur Jenderal (Dirjen).

Pengendalian dilaksanakan sebagai proses pelaksanaan sedang berlangsung, sedangkan pengawasan dapat dilaksanakan sebagai pelaksanaan sedang berlangsung dan setelah pelaksanaan selesai. Pengendalian berfungsi agar pelaksanaan kebijakan publik dalam tahapan tertentu mencapai sasaran dengan terkait yang sesuai, dan sumber daya/dana yang telah diprogramkan.

Penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dari pelaksanaan kebijakan melalui pengawasan dan monitoring (pemantauan) dapat ditindaklanjuti dengan:

Pembatalan pelaksanaan;

Penerapan revisi program pelaksanaan.

Instrumen pengawasan adalah :

Laporan pelaksanaan yang dibuat secara berkala;

Hasil peninjauan lapangan baik secara sampel maupun menyeluruh.

Kejujuran dalam laporan pelaksanaan dan kejujuran dalam tindakan pengendalian merupakan faktor kunci apakah kebijakan publik yang ditetapkan dan dilaksanakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.

Seperti halnya kegiatan pelaksanaan, maka kegiatan pengawasan pun harus ditopang dengan dana, organisasi, kewenangan, prasarana dan sarana yang memadai.

PELAKSANA (IMPLEMENTOR) KEBIJAKAN

Birokrasi

Dalam sistem politik modern, misalnya di AS, pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan terutama oleh sistem badan-badan administrasi yang kompleks. Badan-badan administrasi ini yang melakukan tugas pemerintahan sehari-hari, dan dengan demikian memengaruhi warga negara secara lebih langsung dalam tindakan-tindakan mereka. Badan-badan ini yang disebut **birokrasi** dan mempunyai keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang berada dalam yurisdiksinya karena bekerja berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan.

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari orang banyak (Wahyudi Kumorotomo,

1992:74). Kata birokrasi juga bermakna suatu metode organisasi yang rasional dan efisien (David Osborne dan Ted Gaebler, 1999:14).

Birokrasi menurut Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer dalam Riant Nugroho (2012:161), adalah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik ataupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrassi rasional yang netral pada skala besar. Dalam masyarakat modern, di mana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan rutin, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi disematkan pada jabatan-jabatan eksekutif yang dalam prakteknya dijabarkan dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pejabat eksekutif dimaksud adalah :

Presiden dan Wakil Presiden;

Menteri dan Pejabat Pemerintah setingkat Menteri (LPNK);

Gubernur dan Wakil Gubernur;

Duta Besar;

Perbankan miik negara dan perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN/ BUMD), dll.

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

Pejabat Administratif :

Pejabat Struktural Pusat (Eselon I dan II);

Pejabat Struktural Daerah Provinsi (Eselon I dan II);

Pejabat Struktural Daerah Kabupaten/Kota (Eselon II dan III);

Para Pejabat Humas Pemerintah;

Pejabat Pimpinan Pelaksana di tingkat bawah (Camat, Kepala Kelurahan/ Kepala Desa).

Lembaga Legislatif

Secara tradisional, asumsi dalam banyak literatur administrasi publik dinyatakan bahwa politik dan administrasi merupakan kegiatan-kegiatan

yang terpisah. Politik mempunyai kegiatan yang erat dengan perumusan kebijakan yang harus ditangani oleh cabang-cabang “politik” dari pemerintah, dalam arti cabang eksekutif dan cabang legislatif. Di sisi lain, tata kelola kebijakan berkaitan dengan implementasi keputusan yang dibuat oleh lebih banyak cabang politik dan ditangani oleh berbagai badan administratis (Budi Winarno, 2012:222).

Sekarang asumsi ini dipersoalkan, karena cabang-cabang administratif seringkali terlibat dalam perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Misalnya, pada saat badan-badan administratif merancang regulasi yang mendukung perundang-undangan yang sudah ada, badan-badan ini acap merumuskan kebijakan. Lebih dari itu, badan-badan legislatif seringkali terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik. Malahan sekarang ini semakin meningkat keterlibatan badan-badan legislatif dalam implementasi, dan dengan demikian, merancang UU yang sangat spesifik, ketika berkaitan dengan implementasi.

Lembaga-lembaga legislatif sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi MPR itu *bikameral*. DPD adalah wakil-wakil dari daerah provinsi semacam senat di AS. Adapun di lingkungan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lembaga Peradilan

Dalam banyak kasus, dalam sebuah sistem politik modern seperti di AS, diberlakukan tindakan yudisial. Misalnya, UU berkenaan dengan kejahatan merupakan contoh kasus yang jelas, di mana lembaga peradilan juga terlibat dalam implementasi UU yang mengatur aborsi.

Lembaga peradilan bisa terlibat langsung dalam tata kelola kebijakan. Contohnya, naturalisasi bagi warga negara asing sebenarnya merupakan bentuk administrasi, namun ditangani oleh peradilan distrik

federal. Demikian juga halnya di Indonesia. Namun demikian, yang terpenting keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks memengaruhi tata kelola/administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan administratif dan regulasi, dan kajian ulang terhadap keputusan-keputusan administratif dalam kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Lembaga peradilan bisa memfasilitasi, menghambat, atau secara luas mementahkan implementasi kebijakan-kebijakan tertentu melalui putusan-putusan yang ditetapkan oleh lembaga itu. Contohnya putusan uji materil (*yudisial review*) atas UU terhadap UUD 1945 yang berakibat batalnya implementasi oleh pihak eksekutif bila uji materil dikabulkan oleh MK.

Lembaga peradilan (*yudikatif*) di Indonesia berdasarkan ketatanegaraan yang berlaku sekarang adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Kelompok-kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Perjuangan antarkelompok kepentingan yang biasanya bergerak di wilayah legislatif bisa bergeser ke wilayah administratif. Berdasarkan diskresi yang berlaku dalam banyak badan administrasi, suatu kelompok yang berhasil memengaruhi tindakan badan administrasi mungkin mempunyai efek secara substansial pada arah dan dampak dari kebijakan publik. Kadangkala hubungan antara suatu kelompok kepentingan dengan suatu badan administrasi bisa begitu dekat, sehingga kelompok kepentingan dimaksud telah “menguasai” badan administrasi bersangkutan.

Kelompok-kelompok penekan tersebut bisa konvensi-konvensi, dewan, atau asosiasi perusahaan-perusahaan, partai politik, organisasi massa, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, komnas atau pegiat hak asasi manusia, kaum pluralis, federasi buruh, ICW, Organda, asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Tekstil, komunitas orang-orang

(massa) yang berunjuk rasa memprotes sesuatu karena merasa dirugikan oleh tindakan pejabat publik, dsb.

Organisasi-organisasi Masyarakat

Pada tingkat lokal, organisasi-organisasi atau komunitas masyarakat termasuk partai politik juga seringkali terlibat dalam implementasi program-program publik. Contoh di AS misalnya masyarakat tergabung dalam dewan penasihat untuk pengelolaan limbah dan sangat berbahaya pada tahun 1984, sehingga perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah yang berdampak polusi harus mentaati UU federal. Juga pembentukan berbagai komite petani di bawah program konservasi tanah dan penyangga harga departemen pertanian, dll. Di Indonesia pun misalnya adanya Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKS).

B. Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi (Reintegrasi)

1. Pengertian

Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Tubuh manusia, misalnya, terdiri dari bagianbagian yang masing-masing mempunyai fungsi dalam rangka hidupnya seluruh tubuh manusia sebagai suatu kesatuan. Apabila seseorang sedang sakit, bisa dikatakan salah satu bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, secara keseluruhan bagian-bagian tubuh manusia tadi merupakan keserasian yang fungsional.

Demikian juga kehidupan dalam sebuah kota, misalnya, merupakan suatu organisasi tersendiri. Ada kegiatan membersihkan kota pada waktu-waktu tertentu; jalan raya untuk keperluan transpor, restoran, tempat rekreasi, sekolah, rumah penduduk, dan seterusnya. Apabila salah satu bagian kota tadi tidak berfungsi, timbullah ketidakserasian. Misalnya saja, jika ada jalan yang ditutup karena rusak berat, lantas akan timbul kemacetan. Maka, dapadah dikatakan bahwa disorganisasi adalah suatu

keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Misalnya dalam masyarakat, agar dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antarbagiannya.

Perlu ditegaskan bahwa tidak hanya terdapat dua kutub yang berbeda atau berlawanan, yaitu disorganisasi dan adanya organisasi karena disorganisasi mengenal pula bermacam-macam derajat atau tahap-tahap kelangsungan. Disorganisasi tidak semata-mata terjadi karena pertentangan-pertentangan yang meruncing, seperti misalnya peperangan, tetapi dapat pula disebabkan karena kemacetan lalu-lintas umpamanya. Kedua hal itu mempunyai pengaruh yang berbeda derajatnya. Kriteria terjadinya disorganisasi antara lain terletak pada persoalan apakah organisasi tersebut berfungsi secara semestinya atau tidak baik. Suatu mesin tik tertentu dikatakan bekerja lebih baik karena keserasian antarbagian di dalam melaksanakan fungsinya juga bekerja lebih baik.

Masalah lain yang sering timbul adalah disorganisasi dalam masyarakat acap kali dihubungkan dengan moral, yaitu anggapan-anggapan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pemogokan buruh, misalnya, dianggap oleh golongan konservatif sebagai perbuatan tidak baik padahal gejala tersebut bila dilihat dari sisi lain tidak demikian halnya. Pemogokan bisa saja dilihat sebagai sarana penyerasi antara hak dan kewajiban. Jadi, disorganisasi tidak selalu menyangkut persoalan moral. Sebaliknya, perbuatan yang immoral belum tentu merupakan disorganisasi, misalnya pada suatu waktu sekumpulan pemuda tanggung mencuri di sebuah toko. Perbuatan tersebut tidak mengakibatkan disorganisasi, tetapi merupakan perbuatan yang immoral dan sekaligus merupakan delik.

Sehubungan dengan masuknya unsur-unsur baru, di dalam tubuh suatu sistem sosial seperti masyarakat, ada unsur-unsur yang menentukan sifatnya sistem sosial tersebut, yang tidak dapat diubah selama hidup oleh pihak mana pun juga. Seperti biji jagung hanya dapat menumbuhkan sebuah pohon jagung yang tidak dapat menghasilkan buah lain daripada

buah jagung. Maka, suatu lembaga pemerintahan misalnya, tidak akan dapat berubah menjadi *night club*.

Sistem sosial di dalam pertumbuhannya mungkin memengaruhi diri sendiri sehingga yang terjadi bukanlah perubahan-perubahan inti, tetapi memengaruhi suasana masyarakat yang melingkunginya. Misalnya pemerintahan demokratis menjadi pemerintahan otokratis atau kapitalistis menjadi sosialis. Sebaliknya menurut Sorokin, lingkungan di sekitar dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhan sistem sosial, bahkan dapat menghancurkan sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak mungkin akan berhasil mengubah sifatnya yang pokok.

Teori Sorokin dapat dimengerti dengan lebih jelas apabila di dalam meninjau suatu sistem sosial diadakan pemisahan antara pengertian bentuk dengan tujuannya. Ada sistem sosial yang bentuknya sesuai benar dengan tujuannya, misalnya suatu perusahaan dagang yang mengambil bentuk perseroan terbatas. Akan tetapi ada sistem sosial bentuknya tidak sesuai dengan tujuannya, mungkin karena disengaja, atau juga karena tidak disengaja, seperti misalnya suatu perkumpulan sosial yang mempunyai tujuan politik. Di dalam semua itu, maka yang menentukan corak serta sifat pokok suatu sistem sosial adalah tujuan, bukan bentuknya.

Suatu disorganisasi atau disintegrasi mungkin dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.

Tahap reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga (*institutionalized*) dalam diri warga masyarakat. Berhasil atau tidaknya proses pelembagaan (*institutionalization*) tersebut dalam masyarakat mengikuti formula sebagai berikut.

Efektivitas menanam merupakan basil positif penggunaan tenaga manusia, alat, organisasi, dan metode di dalam menanamkan lembaga baru. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, alat-alat yang dipakai organisasi yang tertibnya dan sistem penanaman sesuai dengan kebudayaan masyarakat makin besar pula hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu.

Akan tetapi, setiap usaha untuk menanam sesuatu unsur yang baru pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang masyarakat, itu mempunyai pengaruh negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan (*institutionalization*).

Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang masyarakat besar, kemungkinan suksesnya proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya apabila efektivitas menanam besar dan kekuatan menentang masyarakat kecil, jalannya proses pelebagaan menjadi lancar. Berdasarkan hubungan timbal balik antara kedua faktor yang berpengaruh positif dan negatif itu, orang dapat menambah kelancaran proses pelebagaan dengan memperbesar efektivitas menanam dan/ atau mengurangi kekuatan menentang masyarakat.

Perlu pula diperhatikan bahwa penggunaan kekerasan untuk mengurangi kekuatan menentang masyarakat biasanya malah memperbesar kekuatan tersebut. Hanya saja tentu ada kemungkinan bahwa kekuatan menentang tidak menjelma menjadi aksi ke luar, tetapi meresap ke dalam jiwa dalam bentuk dendam atau benci. Perasaan-perasaan demikian juga menghambat berhasilnya proses pelebagaan.

Di samping pengaruh positif dan negatif itu, ada pula pengaruh dari faktor ketiga, yaitu faktor kecepatan menanam. Artinya adalah panjang atau pendeknya jangka waktu menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan

semakin cepat pula mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek pelebagaan dalam masyarakat. Sebaliknya makin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkan untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

Efek kecepatan usaha-usaha menanam tersebut sebenarnya tidak dapat dilihat tersendiri, tetapi selalu harus dihubungkan dengan faktor efektivitas menanam. Apabila penambahan kecepatan menanam disertai dengan usaha menambah efektivitas, hasil proses pelebagaan tidak akan berkurang. Hasil tersebut akan berkurang apabila hanya kecepatan menanam saja yang ditambah tanpa memperbesar efektivitasnya. Ekses ke jurusan yang sebaliknya tidak menguntungkan proses pelebagaan. Apabila kecepatan menanam diulur-ulur sampai tidak ada Batas waktunya sama sekali kecenderungan pada efektivitas menanam menjadi berkurang, karena kurang atau tidak ada dorongan untuk mencapai hasil.

2. Gambaran Mengenai Disorganisasi dan Reorganisasi

Gambaran mengenai disorganisasi dan reorganisasi dalam masyarakat pernah dilukiskan oleh William. I. Thomas dan Florian Znaniecki dalam karya klasiknya yang berjudul *The Polish Peasant in Europe and Amerika*. Khusus tentang *On Disorganization and Reorganization*, mereka membentangkan pengaruh dari suatu masyarakat yang tradisional dan masyarakat yang modern terhadap jiwa para anggotanya Watak atau jiwa seseorang paling tidak merupakan pencerminan kebudayaan masyarakatnya.

Pada masyarakat-masyarakat tradisional, aktivitas seseorang sepenuhnya berada di bawah kepentingan masyarakatnya. Segala sesuatu didasarkan pada tradisi dan setiap usaha untuk mengubah satu unsur masyarakat seluruhnya. Struktur dianggap sesuatu yang suci, tak dapat diubah-ubah dengan drastis dan berjalan lambat sekali. Perubahan dari suatu masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern akan mengakibatkan pula perubahan dalam jiwa setiap anggota masyarakat itu.

Thomas dan Znaniecki menggambarkan betapa para petani Polandia yang pindah dari Eropa ke Amerika mengalami disorganisasi karena di tempat asalnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang tradisional dan di Amerika mereka berhadapan dengan masyarakat modern yang mempunyai pola kehidupan yang berbeda. Timbullah disorganisasi, misalnya dalam keluarga batih. Orang tua di Eropa mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap anak-anaknya, tetapi di Amerika kekuasaan tadi menjadi pudar dan melemah. Dan dalam reorganisasi, timbullah norma-norma baru yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anak.

Apabila disorganisasi terjadi dengan sangat cepat, misalnya karena meletusnya revolusi, maka mungkin akan timbul hal-hal yang sukar untuk dikendalikan. Dengan demikian, reorganisasi tidak dapat terjadi dengan cepat karena terlebih dahulu harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kemungkinan akan terjadi suatu keadaan di mana norma-norma lama sudah hilang karena disorganisasi tadi, sedangkan norma-norma baru belum terbentuk. Keadaan tersebut merupakan keadaan krisis dalam masyarakat. Pada keadaan demikian dijumpai suatu *anomie*, yaitu suatu keadaan di mana tak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk sehingga anggota-anggota masyarakat tidak mampu mengukur tindakan-tindakannya karena batas-batas tidak ada. Anomie mungkin pula terjadi pada waktu suatu disorganisasi meningkat ke tahap reorganisasi.

Suatu contoh adalah norma-norma dalam lalu lintas, terutama di kota-kota besar di Indonesia, umpamanya di Jakarta. Sopan santun berlalu lintas yang secara minimal menyangkut ketaatan seseorang pengemudi atau orang yang jalan kaki, pada peraturan-peraturan lalu lintas sering dilanggar. Pada umumnya terlihat adanya suatu kecenderungan untuk melanggar peraturan-peraturan tersebut, padahal peraturan bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat, termasuk para pengemudi dan orang-orang yang berjalan kaki. Hal itu paling tidak dapat dijadikan suatu indeks terhadap keadaan sampai di mana disorganisasi masih berlangsung

dan apakah ada suatu reorganisasi masih berlangsung dan apakah telah ada suatu reorganisasi.

3. Ketidakserasian Perubahan-perubahan dan Ketertinggalan Budaya (*Cultural Lag*)

Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selalu perubahan-perubahan pada unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelainan yang seimbang. Dikenalnya senjata api dan kuda oleh orang-orang Indian di Amerika Serikat mengubah cara mereka mencari makanan dan berperang. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya seperti agama yang disebarkan oleh penyiur-penyiur agama kulit putih.

Ada unsur-unsur yang dengan cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sukar untuk berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Apabila terdapat unsur-unsur yang tidak mempunyai hubungan yang erat, tak ada persoalan mengenai tidak adanya keseimbangan lajunya perubahan-perubahan. Misalnya, suatu perubahan dalam cara bertani, tidak begitu berpengaruh terhadap tari-tarian tradisional. Akan tetapi, sistem pendidikan anak-anak mempunyai hubungan yang erat dengan dipekerjakannya tenaga-tenaga wanita pada industri, misalnya.

Apabila dalam hal ini terjadi ketidakserasian, kemungkinan akan terjadi kegoyahan dalam hubungan antara unsur-unsur tersebut di atas sehingga keserasian masyarakat terganggu. Misalnya, apabila pertambahan penduduk berjalan dengan cepat, untuk menjaga tata- tertib dalam masyarakat diperlukan pula penambahan petugas- petugas keamanan yang seimbang banyaknya. Ketidakserasian mungkin akan menaikkan frekuensi kejahatan yang terjadi. Demikian pula bertambah banyaknya sekolah-sekolah harus diimbangi dengan penambahan lapangan kerja, apabila terjadi ketidakserasian, maka mungkin timbul pengangguran dan seterusnya.

Sampai sejauh mana akibatnya keadaan tidak serasi laju perubahan tersebut tergantung dari erat atau tidaknya integrasi antara unsur-unsur tersebut. Apabila integrasi unsur-unsur dalam masyarakat sangat erat seperti halnya dengan bagian-bagian sebuah jam, ketidakseimbangan mempunyai akibat-akibat yang sangat jauh. Kalau bagian-bagian dari sebuah jam tidak bekerja dengan semestinya, jam itu tidak akan berfungsi dengan baik. Suatu teori yang terkenal di dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori ketertinggalan budaya (*cultural lag*) dari William F. Ogburn. Teori tersebut mulai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya seperti diuraikan sebelumnya, tetapi ada bagian yang tumbuh cepat, sedangkan ada bagian lain yang tumbuhnya lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat dinamakan *cultural lag* (artinya ketertinggalan kebudayaan). Juga suatu ketertinggalan (*lag*) terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau kebudayaan (mungkin juga lebih) yang mempunyai korelasi, tidak sebanding sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur lainnya.

Suatu contoh dapat dikemukakan mengenai tenaga listrik antara tahun 1963-1966 di Jakarta, dibandingkan dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya. Keadaan listrik di kota Jakarta sangat di bawah norma-norma persyaratan listrik bagi kota-kota besar, dan dari hal itu dapat pula dinilai norma-norma kesejahteraan masyarakat Jakarta ini. Listrik di Jakarta hanya dapat melayani 100.000 langganan atau 500.000 penduduk, yang berarti lebih kurang hanya 13% dari seluruh penduduk Jakarta, atau satu di antara delapan keluarga. Keadaan perlistrikan yang sebenarnya di Jakarta adalah sebagai berikut.

Adanya *cultural lag* di sini dikarenakan tidak sesuainya penyediaan dengan pemakaian tenaga listrik dan juga karena terlalu cepatnya perkembangan penduduk Jakarta apabila dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan penyediaan listrik. Keadaan tersebut mengakibatkan

terjadinyaketidakwajaran, misalnya pencurian listrik yang menyebabkan para konsumen yang benar-benar berlangganan dirugikan.

Suatu contoh lain adalah perihal pertambahan jumlah kendaraan bermotor dengan area jalan raya, khususnya di Jakarta. Antara tahun 1971 sampai dengan 1979, jumlah kendaraan bertambah tiga kali, sedangkan area jalan raya dari 837 km² menjadi 1477 km² yang berarti tak ada keseimbangan dalam pertambahan kedua faktor yang saling berkaitan itu.

Pengertian ketertinggalan dapat digunakan paling sedikit dalam dua arti, yaitu *pertama* sebagai jangka waktu antara terjadi dan diterimanya penemuan baru. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat dalam suatu brosur mengetengahkan mengenai ketertinggalan antara penemuan baru dengan penggunaan penemuan pengetahuan tentang pengobatan, 53 yang antara lain berisi bahwa setiap tahun 40.000 orang mati karena sakit kanker, yang sebenarnya dapat dicegah, dan demikian pula dengan orang-orang yang mati karena sakit jantung dan sebagainya.

Arti kedua dipakai untuk menunjuk pada tertinggalnya suatu unsur tertentu terhadap unsur lainnya yang erat hubungannya, misalnya penduduk di kota-kota besar dan banyaknya petugas-petugas keamanan yang diperlukan. Agar terjadi suatu keserasian, salah satu unsur tersebut harus diubah, yaitu yang terlambat dipercepat perkembangannya, atau yang terlalu cepat diperlambat perkembangannya. Pilihan tergantung dari kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya dalam hubungan antara bertambahnya penduduk di kota-kota besar dengan jumlah petugas-petugas keamanan, kiranya kecil kemungkinannya untuk mengurangi penduduk, misalnya dengan jalan mengusir penduduk dari kota tersebut.

Ketertinggalan yang mencolok adalah tertinggalnya alam pikiran dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang dijumpai terutama pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Suatu contoh nyata adalah penggunaan komputer yang merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi di negara-negara maju. Penggunaan alat tersebut harus disertai oleh peralatan-peralatan khusus seperti untuk memperbaikinya apabila rusak; aliran listrik harus

mempunyai ketegangan tertentu, konstan, dan seterusnya. Ini belum semuanya tersedia, misalnya, aliran listrik yang konstan. Hal itu dapat memacetkan komputer atau kalau rusak, untuk memperbaikinya belum tentu tersedia alat dan ahli yang cukup.

Tidak mudah memang untuk mengatasi persoalan demikian. Paling tidak alam pikiran manusia harus mengalami perubahan terlebih dahulu, yaitu dari alam pikiran tradisional ke alam pikiran yang modern. Alam pikiran yang modern ditandai oleh beberapa hal, misalnya sifatnya yang terbuka terhadap pengalaman baru serta terbuka pula bagi perubahan dan pembaruan. Tekanan dalam hal ini bukanlah terletak pada keahlian dan kemampuan jasmaniah belaka, tetapi pada suatu jiwa yang terbuka. Alam pikiran modern tidak hanya terpaut pada keadaan sekitarnya saja yang langsung, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang di luar itu, yaitu berpikir dengan luas. Di sini pendidikan memperoleh posisi menentukan; semakin terdidik seseorang semakin terbuka dan semakin luas daya pikirnya. Dia harus menyadari bahwa ada pendapat-pendapat lain dan sikap-sikap lain yang mengelilingi dirinya. Kondisi lain yang harus pula diperhatikan adalah bahwa alam pikiran modern lebih berorientasi pada keadaan sekarang serta keadaan-keadaan mendatang daripada terhadap keadaan-keadaan yang telah lalu; dan sehubungan dengan itu dia harus mengadakan perencanaan (*planning*) untuk hari depannya.

Kiranya seseorang dengan alam pikiran modern, yakin bahwa manusia dapat belajar untuk memanfaatkan dan menguasai alam sekelilingnya daripada bersikap pasrah atau pasif. Seseorang juga yakin bahwa keadaan-keadaan dapat diperhitungkan, artinya bahwa orang-orang lain serta lembaga-lembaga lain dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya. Dia tidak setuju pada pendapat bahwa segala sesuatu ditentukan oleh nasib atau oleh watak dan sifat-sifat yang khusus dari orang-orang tertentu.

Sehubungan dengan itu timbul kesadaran akan harga diri orang-orang lain sehingga dia menaruh keseganan terhadap mereka. Kemudian, dia lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun dengan

cara-cara sederhana sekalipun. Hal itu menimbulkan keyakinan kepadanya bahwa penghargaan sebagai balas jasa diberikan kepada mereka yang betul-betul telah berjasa dan tidak atas dasar kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya. Itu semuanya terutama dapat dicapai dengan pendidikan supaya orang dapat berpikir secara ilmiah. Cara berpikir secara ilmiah harus melembaga dalam diri manusia, terutama pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang agar terhindar dari terjadinya ketertinggalan budaya.

C. Arah Perubahan (*Direction of Change*)

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Hal yang jelas adalah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan, dan industrialisasi yang disertai dengan usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia merupakan contoh kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita. Guna memperoleh gambaran jelas mengenai arah perubahan termaksud, akan diberikan suatu contoh yang diambil dari *Social Changes in Yogyakarta*.

Jauh sebelum orang Belanda datang ke Indonesia, orang Jawa telah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan tradisionalnya. Dalam cerita-cerita wayang, sering diceritakan bahwa guru yang bijaksana, mengumpulkan kaum muda sebagai cantriknya di tempat kediamannya serta mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk dapat hidup sebagai warga masyarakat yang baik. Cantrik-cantrik tersebut hidup bersama-sama dengan guru mereka dalam pondok-pondok, di mana mereka bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan kehidupan gurunya,

sambil menerima ajaran-ajaran sang guru di sela-sela pekerjaan sehari-hari. Sistem tersebut berlangsung berabad-abad lamanya, baik waktu pengaruh Hindu, Buddha maupun Islam masuk, hingga kini.

Dengan masuknya pengaruh Islam, para guru dinamakan kiai, sedangkan pondok-pondok tersebut dinamakan pesantren yang artinya adalah tempat para santri (yaitu orang-orang yang mendalami ajaran-ajaran agama Islam). Banyak yang berguru pada para kiai tersebut untuk mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam. Karena kiai hanya mempunyai satu atau beberapa keahlian saja, banyak murid yang belajar pada beberapa orang kiai agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak belajar pada pesantren tersebut, selain dia bersungguh-sungguh ingin belajar dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama. Kehidupan di pesantren diatur sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh kiai. Di luar pesantren, para muda-mudi dapat pula memperoleh pendidikan keagamaan, misalnya di masjid-masjid.

Akhir-akhir ini, banyak sekolah yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama Islam di mana para siswa juga mendapatkan pelajaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan soal keduniawian (*sekular*). Sekolah-sekolah tersebut dinamakan madrasah. Sistem pendidikan yang demikian di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok, kecuali para santri kemudian diperkenankan mengikuti pelajaran-pelajaran pada sekolah-sekolah biasa di pagi hari. Sesudah revolusi fisik, kecenderungan yang mengarah ke sekularisasi sebagai pandangan hidup masyarakat Yogyakarta semakin nyata. Persoalan-persoalan individual maupun sosial lebih ditafsirkan dalam pengertian-pengertian yang sekular dan rasional. Kecenderungan tersebut tampak pula pada madrasah-madrasah di mana para siswa meminta agar diajarkan lebih banyak mengenai hal-hal yang menyangkut soal-soal keduniawian, seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu pasti, ilmu alam, dan sebagainya supaya menyamai pelajaran-pelajaran yang diberikan pada

sekolah-sekolah biasa. Pemerintah dalam hal ini tampak memberikan bantuan dan semakin banyak pula siswa-siswa madrasah yang mengikuti pelajaran-pelajaran pada sekolah biasa.

Dari gejala tersebut di atas, tidaklah dapat disimpulkan bahwa madrasah dan pesantren-pesantren tersebut sebagai lembaga pendidikan akan terdesak oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sekular. Akan tetapi, keinginan-keinginan yang kuat untuk mendapat pendidikan yang sekular rupanya lebih kuat pada generasi muda. Pendidikan di Indonesia dianggap sebagai alat utama untuk mengadakan perbaikan-perbaikan; dahulu pusat perhatian adalah kebahagiaan di dunia akhirat, tetapi dewasa ini pusat perhatian lebih ditujukan pada kehidupan di dunia ini. Pendidikan keagamaan seyogyanya disesuaikan dengan aspirasi generasi muda sejak proklamasi kemerdekaan.

Sikap dan alam pikiran mengenai keduniawian tersebut, antara lain juga menyebabkan perubahan-perubahan pada sikap serta alam keluarga-keluarga batih. Dewasa ini anak-anak bebas memilih lapangan pekerjaan yang disukainya; demikian pula mengenai agama, mereka bebas memilih agama yang akan dianut. Walau belum sepenuhnya bebas, seseorang dapat memilih sendiri teman hidupnya.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa suatu perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Salah satu jenis perubahan dapat dilakukan dengan mengadakan modernisasi. Garis besarnya akan diuraikan di bawah ini sebagai penutup dari bab perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan.

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui arah mana perubahan tersebut itu bergerak. Hal yang jelas adalah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, atau mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang menjadi fokus dan locus penelitian, yaitu Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS). Peninjauan dilakukan secara langsung dan berhubungan sistem dan prosedur evaluasi kinerja, dan proses kegiatan layanan sosial. Adapun dasar penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pengruus terkait dan relawan di lapangan.

Pelaksanaan penelitian dilakukan sejak bulan Juli 2020. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal dan Prosedur Pelaksanaan Penelitian

No.	Jadwal	Juli				Agustus				Sept.	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Pra Pelaksanaan penelitian										
	a. Survei										
	b. Proses bimbingan										
	c. Menentukan Judul & Topik										
	d. Penyusunan Proposal										
	e. Menyelesaikan administrasi										
	f. Menentukan instrumen										
2.	Pelaksanaan										
	a. Pengumpulan Data										
	b. Proses Bimbingan										
	c. Pengolahan Data										
3.	Penyusunan Laporan										
	a. Penyusunan data										
	b. Proses bimbingan										
	c. Pengetikan data										
	d. Penggandaan laporan										

Secara umum, paradigma peneiitian diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu: Peneiitian Kuantitatif dan Peneiitian kualitatif (Indiantoro & Supomo, 1999:12-13). Kedua peneiitian tersebut memiliki metode masing-masing sehingga dikenal istilah metode peneiitian kualitatif dan metode peneiitian kuantitatif. Masing-masing paradigma metode dimaksud mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam peneiitian ini adalah pendekatan metode peneiitian kualitatif karena peneliti akan berusaha menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan obyek peneiitian yang menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail.

Dalam peneiitian kualitatif terdiri atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Postpositivisme*, pendekatan *konstruktivisme*, dan pendekatan teori kritis. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *konstruktivisme*, sebagaimana pengertiannya yaitu cara memandang seseorang perihal pemerolehan dari pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam hal ini proses penelitian merupakan suatu kegiatan yang aktif dan berkesinambungan dalam menggunakan informasi untuk memperoleh data.

Asumsi yang digunakan dalam pandangan *konstruktivisme*, antara lain :

1. Setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman.
2. Keterlibatan aktivitas relawan sosial dapat mempengaruhi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu.
3. Pengembangan pengetahuan dan pengalaman merupakan mata rantai pengalaman proses, pembangkitan dan penghubungan pengetahuan dengan pengalaman dengan maksud tertentu.
4. Kebenaran pengetahuan atau pengalaman ilmiah merupakan hasil antara data, fakta, berdasarkan metodologis.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada masalah proses. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian dan mendalami mengenai kondisi tentang apa yang terjadi dilapangan (Sutopo, 2002 :111).

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara rinci gejala yang ada dilapangan, mengidentifikasi masaiiah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan dalam menghadapi masaiiah yang sama dan belajar dengan pengalaman untuk menentukan rencana dari keputusan pada waktu yang akan datang (Rachmat, 2002:24-25).

Dalam penelitian deskriptif peneliti berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan turun langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian, yaitu di Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dan pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga diperoleh informasi yang jelas mengenai situasi permasalahan yang diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989:862). Adapun subjek penelitian ini adalah Pengurus BKKKS DKI Jakarta dan para relawan sosial.

Yang dimaksud objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989:622). Menurut (Supranto, 2000:21) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini meliputi proses implementasi kebijakan program pelayanan sosial di BKKKS di era pandemi Covid-19, aktivitas yang dilakukan dalam mendukung

implementasi, pendokumentasian dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses implementasi dimaksud.

D. Sumber Data dan Informan

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, antara lain:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono: 2016: 225). Sumber data primer didapati melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Pelayanan Sosial BKKKS di era Covid-19. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber adalah perwakilan Pengurus BKKKS dan relawan sosial.

2. Data sekunder

Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh BKKKS.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka sumber data penelitian sebagai instrumen kunci yaitu peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian dan diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena informan sebagai

sumber data kualitatif. Sebagaimana menurut Irawan (2006:17): "satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti ini sendiri". Data informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Sumber data dan Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua BKKKS	1
2.	Sekretaris BKKKS	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Relawan Sosial	2

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah .yang pating strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman, dalam Sugiyono, 2010:225). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Marshall dalam Sugiyono (2010:226) menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, pembuatan, kejadian atau

peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasannya peneliti melakukan observasi adalah untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bentuk dari observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipasi (observasi terstruktur dan tidak terstruktur).

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penelitian. Susan Stainback dalam Sugiyono (2013:316) juga mengemukakan bahwa: “dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”.

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta.

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data tidak langsung atau data sekunder ditujukan pada subjek penelitian, tetapi dengan studi dokumen yang *blasa* dikenal dengan studi pustaka (Soeharto, 1995:70). *Studi pustaka* dilakukan dengan tujuan untuk menambah referensi yang berhubungan dengan studi ini. *Peneliti* akan melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka, baik melalui buku-buku referensi maupun sumber internet.

F. Teknik Analisis Data

Data yang peroleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dalam pembahasan. Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berguna yang dilakukan pada saat pengumpulan data berguna untuk mengorganisasikan data sehingga terlihat kelengkapan datanya.

Data yang diperoleh lapangan (data hasil obeservasi langsung dan hasil wawancara mendalam) akan dianalisis dengan menggunakan referensi lain serta interprestasi dari peneliti.

Analisis data yang dilakukan meliputi tiga tahapan :

1. Reduksi Data

- a. Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian.
- b. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display Data

- a. Display data untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

- b. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
 - c. Untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan, maka dibuat matrik atau bagan:
 - 1) Matriks sangat berguna untuk melihat hubungan antara data.
 - 2) Kode digunakan agar data yang banyak dapat dikendalikan.
 - 3) Ada kode deskriptif dan kode inferensial.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
- a. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.
 - b. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep- konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, berikut ini akan dijabarkan hasil dari penelitian lapangan yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini

1. Deskripsi Obyek Penelitian Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Pembentukan BKKKS Dalam rangka merespon kondisi sosial khususnya penanganan PMKS .& urbanisasi.
2. Tidak atau belum sebandingnya pertumbuhan masalah kesos dengan penanganan masalah sosial.
3. Kemampuan Pemerintah dalam penyelenggaraan kesos sangat terbatas dibutuhkan peran masyarakat
4. Hubungan kerja Pemda dengan BKKKS adalah mitra kerja, dimana Pemda sebagai Sterring atau pengarah, artinya memfasilitasi dan penguatan sedangkan BKKKS sebagai Rowwing atau pelaksana.

B. KELEMBAGAAN BKKKS DALAM KESOS

1. Garis depan dalam penyelenggaraan kesos berbasis masyarakat.
2. Pelaku Strategis dalam penyelenggaraan Kesos.
3. Sebagai modal sosial dalam Penyelenggaraan Kesos.
4. Sebagai potensi dan sumber daya Kesos .

5. Kedudukan, Penyelenggaran kesos pada aspek kordinatif kegiatan kesos
6. Arah layanan Penyediaan fasilitasi layanan kordinatif kegiatan kesos
7. Aspek layanan : layanan koordinasi kegiatan pada orsos / LKS dibidang Sosial (pemberdayaan sosial perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, bencana sosial) dan material dibidang kesehatan, pendidikan, budaya dan mental spritual .
8. Sasaran dan kemitraan, Pemda, LKS/orsos/LSM,Dunia usaha, Perguruan Tinggi .

C. Arah dan Strategi

1. Terkordinasinya dan sinergitas penyelenggaraan Kesos disemua tingkatan .
2. Memperkuat pola kemitraan lintas pelaku penyenggara kesos
3. Memperkuat rentang kendali pemetaan masalah dan mutu Penyelenggaraan kesos di orsos/ LKS dan masyarakat.
4. Memperkuat sistem pelayanan Kesos
5. Memperkuat peran Orsos /LKS dan jaringan kemitraan sosial
6. Memperkuat kelembagaan ,kinerja, dan kultur ,Komunikasi sosial organisasi sosial /LKS

D. Faktor Peluang

1. Tingginya komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan Kesos.
2. Tersediannya sumber daya masyarakat dalam berpartisipasi di bidang penyelenggaran kesos
3. Ketersediaan regulasi sebagai landasan penyelenggaraan kesos.

4. Semakin tingginya dukungan publik atas penyelenggaraan kesos.

E. Organisasi Ideal Dalam Sistem Nilai Budaya

1. Terbangunnya struktur yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan dinamika sosial .
2. Terbangunnya pola,sistem,mekanisme dan strategi prosedur dan regulasi kesos
3. Terbangunannya kemampuan dan kualitas kepemimpinan.di semua tingkatan orsos /LKS
4. Kualitas sumber daya manusia,teknologi, Sarana prasarana yang memadai .
5. Terbangunan nilai budaya organisasi dan kepercayaan .

F. Indikator Mengukur Produktifitas

1. Kemampuan membaca perubahan
2. Etos dan budaya Kerja
3. Keselarasan dalam pelaksanaan menejmen.
4. Kemampuan menangani masalah
5. Kemampuan menciptakan dan mempertahankan Kepercayaan.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF BKKKS DKI

A. Kondisi Internal

1. Belum optimalnya organisasi BKKKS melakukan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga kordinatif. Dalam mengatasi masalah sosial.
2. Belum optimalnya kualitas SDM ya berorientasi pada kesos ,ditataran pemahaman, sinergitas, dan subtansi kesos.

3. Banyak pengurus yang masih merasa orang yang Paling tahu,dan berpengalaman.
4. Masih terlalu tergantung kepada peran Pemda DKI .

B. Kondisi Ekternal

Arahan Wagub DKI Jakarta diminta BKKKS bisa memetakan permasalahan sosial dan solusi penanganannya . mengingat kondisi seperti :

1. Laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya mengakibatkan masalah sosial semakin besar, dan kompleks .
2. Masalah sosial semakin berkembang baik jenis maupun jumlahnya sehingga diperlukan organisasi sosial yang responsif
3. Meningkatnya kualitas LKS/ORSOS yang belum diimbangi dengan kualitas kemandirian BKKKS secara komprehensif .

Kedepan diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dibidang struktur, SDM ,menajmen dan tatakelola organisasi .

1. Terbangunnya nilai budaya organisasi yang maju dan sehat.
2. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan sosial ,dalam aspek sertifikasi relawan dan pekerja sosial dan akreditasi lembaga sosial .
3. Terbangunannya komunikasi sosial,program dan fungsi peran BKKS bersama pemda dan LKS/orsos dan pemangku kepentingan kesos .
4. BKKKS sebagai lembaga kesos dibawah koordinasi Dinas Sosial ,perlu memberikan masukan dan saran dan kajian sosial serta laporan atas kondisi sosial yang ada di lingkungan kerja di DKI Jakarta .

C. Isu Isu Strategis

Isu strategis yang selalu menjadi perhatian , yaitu

1. Citra Organisasi
2. Kualitas layanan
3. Budaya kerja
4. Kualitas sumber daya manusia
5. Tatalaksana organisasi dan manajemen
6. Sistem informasi manajemen
7. Kerjasama aliansi strategis dan jejaring

D. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi .

1. Koordinasi dan kegiatan kesos dibidang material, spritual, sosial.
2. Koordinasi dan kegiatan kesos dibidang penanggulangan kemiskinan .
3. Koordinasi dan kegiatan kesos dibidang kemanusiaan
4. Koordinasi dan kegiatan dibidang pendataan dan evaluasi kesos
5. Koordinasi dan kegiatan dibidang sistem informasi kesos
6. Koordinasi dan kegiatan dibidang pelatihan dan ketrampilan sosial
7. Koordinasi dan kegiatan dibidang partisipasi dan usaha kesos.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Organisasi yang berkualitas perlu langkah langkah strategis dalam rangka menjawab permasalahan sosial yang ada dilingkungan organisasi.

BAB III

PERUBAHAN

Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup (*survive*) sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan usia organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Setiap organisasi yang mengabaikan konsep perubahan akan mengalami dampak negatif yang timbul oleh karenanya. Organisasi modern dewasa ini harus menghadapi dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang menyebabkan terciptanya kebutuhan akan perubahan internal organisasi. Menurut McCalman (1989), perubahan suatu Adapun keempat macam lapisan tersebut adalah sebagai berikut:

Lapisan pemicu (*the trigger layer*), yang berhubungan organisasi memerlukan apa yang disebut dengan “*Perpetual Transition Management*”, yaitu suatu kerangka kerja manajemen transisi yang akan memberikan sejumlah pemahaman penting tentang apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya. Model manajemen transisi tersebut mencakup 4 (empat) macam proses yang saling terkait dan beroperasi pada tingkatan yang berbeda dan mencakup berbagai factor yang berbeda pula dalam hirarkhi keorganisasian:

1. Dengan identifikasi kebutuhan dan peluang-peluang untuk perubahan penting, yang dirumuskan secara sadar dalam

wujud peluang-peluang dan bukan dalam bentuk ancaman-ancaman atau krisis-krisis.

2. Lapisan visi (*the vision layer*), yang menetapkan perkembangan masa yang akan datang organisasi yang bersangkutan, dengan jalan menekankan suatu visi dan mengkomunikasikannya secara efektif, sehubungan dengan arah kemana organisasi tersebut sedang melaju.
3. Lapisan konversi (*the conversion layer*) yang dibentuk guna memobilisasi dukungan di dalam organisasi yang bersangkutan, bagi visi baru tersebut sebagai metode yang paling tepat dalam hal menangani pemicu-pemicu perubahan tersebut.
4. Lapisan pemeliharaan dan pembaruan, yang mengidentifikasi cara-cara dengan apa perubahan dipertahankan, serta dikembangkan melalui perubahan-perubahan dalam sikap dan perilaku, dan dipastikan tidak akan kembalinya organisasi tersebut ke tradisi-tradisi yang berlaku sebelumnya.

Kemungkinan untuk mengimplementasikan perubahan secara berhasil sangat meningkat apabila setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan terjadi, dan mengapa hal tersebut akan terjadi. Dalam hal ini, para pengambil keputusan perlu menyadari benar-benar bahwa perubahan merupakan suatu proses konstan di dalam suatu organisasi modern. Sebagai sebuah proses, perubahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut M. Nur Nasution (2010), perubahan pada sebuah organisasi dapat memicu timbulnya penolakan baik dari individu maupun dari organisasi itu sendiri. Banyak faktor yang mendorong timbulnya resistensi individu terhadap perubahan tersebut, yaitu antara lain:

1. Ketidakamanan ekonomis;
2. Ketakutan atas perubahan ;
3. Ancaman pada hubungan sosial;
4. Kebiasaan;
5. Kegagalan kebutuhan untuk berubah;
6. Proses informasi selektif;
7. Iklim ketidakpercayaan;
8. Ketakutan akan kegagalan;
9. Konflik pribadi/kepentingan.

Perubahan pada tingkat organisasional juga dapat menghadapi resistensi yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Beberapa faktor yang menjadi penghambat pada tingkat organisasional dalam menjalankan proses perubahan yaitu antara lain:

1. Kelambanan struktural dan kelompok kerja;
2. Tantangan keseimbangan kekuatan yang ada;
3. Usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil;
4. Terlalu fokus pada perubahan terbatas;
5. Ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada;
6. Ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada.

Resistensi terhadap perubahan ini tidak bisa disepelekan karena sifatnya yang menular, melumpuhkan, dan merintang , sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari perubahan itu sendiri. Seperti disebutkan di atas, perubahan senantiasa mengandung makna, beralihnya keadaan sebelumnya (*the before condition*) menjadi keadaan setelahnya (*the after condition*). Perlu diingat bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik, sehingga dalam hal demikian tentu perlu diupayakan agar dimungkinkan perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu proses transformasi, yang tidak selalu berlangsung dengan lancar,

mengingat bahwa perubahan-perubahan seringkali disertai dengan aneka macam konflik yang muncul. Disinilah arti penting dari manajemen pengelolaan, yaitu untuk mengawal agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan yang seminimal mungkin.

Pada organisasi Organisasi masyarakat , semangat mewujudkan perubahan mulai muncul ketika disadari bahwa organisasi tersebut diidentifikasi dengan tidak produktif, tidak efisien, selalu merugi, rendah kualitas miskin inovasi dan kreatifitas. Perubahan tersebut diarahkan pada perbaikan lingkungan serta dinamika sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen organisasi yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini dalam konteks saat ini dikenal dalam istilah Reformasi.

Di lihat dari ruang lingkupnya, reformasi mencakup aspek eksternal dan aspek internal. Dalam aspek eksternal, reformasi organisasi diletakan pada penciptaan kontrak baru antara BKKKS dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab publik. Dalam aspek internal, reformasi organisasi diletakan pada 3 (tiga) titik tekan, yaitu

1. Model pengembangan/revitalisasi struktur dan sistem internal BKKKS ,
 2. modernisasi proses internal BKKKS, dan ,
 3. peningkatan kemampuan pelaksana./pemangku kegiatan sosial .
- Dengan pendekatan demikian, maka ruang lingkup revitalisasi reformasi BKKKS tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku individu.

Dalam hal ini, perubahan *mind-set* dan *culture-set* individu menjadi hal yang sangat esensial dalam proses reformasi organisasi. Perubahan *mind-set* dan *culture-set* tersebut mencakup seluruh

individu dalam organisasi, mulai dari level terendah sampai dengan level pimpinan teratas. Pelaksanaan reformasi organisasi, seringkali dihadapkan pada banyak kendala sehingga perubahan yang dikehendai tidak tercapai secara optimal. Kendala yang paling sering dan menonjol dari upaya untuk melakukan perubahan adalah penolakan atas perubahan itu sendiri (*resistance to change*), baik yang dilakukan secara individual maupun oleh organisasional, bahkan tidak tertutup adanya intervensi dari pemerintah. Penolakan tersebut umumnya disebabkan rasa takut terhadap berkurang/hilangnya kekuasaan, kegagalan kerja, ketidakmampuan menghadapi masalah baru, dan terancamnya kepentingan pribadi dan kelompok. Penerapan dimensi *cultural* juga acap kali menjadi kendala dalam upaya reformasi organisasi. Penerapan dimensi *cultural* merupakan hal yang sulit karena mengandung 3 (tiga) elemen utama yaitu ;

1. Mengubah kebiasaan,
2. Meyentuh perasaan dan,
3. Mengubah pola pikir, kendala lain adalah masih kuatnya pandangan negatif masyarakat terhadap organisasi yang tergantung kepada pemerintah

Dalam konteks revitalisasi atau Reformasi organisasi di BKKKS, reformasi tersebut diarahkan pada bagaimana menciptakan BKKKS yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi profesional mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik pekerja sosial.

Adapun area perubahan yang disasar mencakup seluruh aspek manajemen organisasi di BKKKS yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja sosial.

Perubahan ke arah itu dilakukan dengan melibatkan setiap individu pegawai/pengurus di lingkungan BKKKS beserta jaringannya untuk berbuat kearah yang lebih baik dengan memiliki kemampuan yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan di bidang kerja masing-masing. Dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi organisasi mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan, maka perlu dirumuskan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi manajemen perubahan di BKKKS.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI BKKKS

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dilakukannya penataan organisasi itu agar dapat menentukan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan sosial. Hal ini terutama karena penataan organisasi terkait dengan bagaimana struktur organisasi disusun, tugas dan fungsi dirumuskan, serta bagaimana tumpang tindih, duplikasi dan size organisasi yang dikelola akan menentukan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi. Mengingat pentingnya struktur dan tata kerja terhadap kinerja organisasi tersebut, tentu diharapkan bahwa penataan organisasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Berbagai aspek krusial dalam penataan organisasi seperti peraturan perundang-undang yang mengaturnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, kapasitas organisasi itu sendiri, dan responsifitas terhadap perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks seperti tekanan public, politik, organisasi internasional, krisis ekonomi, lingkungan, ideologi, sosial, dan permasalahan krusial lainnya tidak bisa diabaikan.

Dengan demikian, penataan organisasi BKKKS bukanlah hal yang mudah dan sederhana mengingat di era globalisasi ini, kompleksitas tiap-tiap aspek tersebut kian tinggi.

Salah satu tuntutan dari reformasi adalah BKKKS yang akuntabel dan bertanggungjawab atas setiap proses kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Penataan organisasi dan tata kerja di BKKKS merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi yang harus mengarah kepada organisasi yang efisien, efektif, akuntabel dan produktif serta mampu memberikan dampak kerja yang positif, memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya). Selain itu, dengan dilaksanakannya penguatan organisasi, diharapkan BKKKS memiliki kinerja maksimum untuk mengelola kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancaman demi mencapai hasil yang optimal.

BKKKS sebagai salah satu lembaga masyarakat, secara berkesinambungan terus berupaya melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan terhadap dinamika sosial politik serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat.

BKKKS diharapkan mulai melaksanakan proses penataan organisasi yang meliputi pemisahan, fungsi, dan penajaman fungsi, serta modernisasi yang bermuara kepada organisasi dan tata kerja yang lebih mapan, fleksibel, cepat, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penataan dan penyempurnaan organisasi dilakukan

mulai pengurus, kelompok kerja maupun unit usaha sehingga antar unit kerja satu dengan yang lain tercipta keselarasan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing .

2. Maksud dan Tujuan

Penataan dan penguatan organisasi BKKKS dimaksudkan untuk melakukan restrukturisasi *tugas dan fungsi unit kerja unit kerja di lingkungan BKKKS menangani fungsi organisasi, tatalaksana, koordinasi dan pelayanan sosial* , sehingga menjadi lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, *check and balances, right sizing*, serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi dengan memperhatikan lingkungan strategis global maupun nasional dan lokal serta visi dan misi organisasi BKKKS. Sedangkan tujuan dari penataan dan penguatan organisasi adalah untuk mewujudkan *restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja dan penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan , tenaga sosial* yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, *check and balances, right sizing*, serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKKS dengan memperhatikan lingkungan strategis global maupun nasional serta visi dan misi BKKKS

Sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial maka Kesejahteraan sosial hendaknya berlandaskan

- a. Kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip .
 - 1) Tidak diskriminatif
 - 2) Menjunjung tinggi nilai keagamaan dan budaya
 - 3) Menjunjung tinggi hak azasi manusia

- 4) Menjunjung tinggi nilai etika dan estetika
 - 5) Kemajemukan
 - 6) Profesionalisme
 - 7) Keterpaduan
 - 8) Kesetiakawanan sosial
 - 9) Taat hukum dan
 - 10) Akuntabilitas dan transparansi .
- b. Fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- 1) Mencegah terjadinya masalah sosial .
 - 2) Memukuhkan fungsi sosial
 - 3) Mengembangkan potensi sosial
 - 4) Memberdayakan sumber daya sosial .
 - 5) Memberdayakan penerimaan layanan warga binaan
 - 6) Mencegah kerawanan sosial .
- c. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial
- 1) Mewujudkan pelayanan sosial kebutuhan dasar ,dan jaminan sosial
 - 2) Mewujudkan ketahanan sosial masyarakat .
- d. Sasaran penyelenggaraan sosial meliputi, perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, yang memenuhi kriteria: Kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan sosial, korban bencana dan tindak kekerasan dan eksploitasi .
- e. Pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan , ketahanan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial , rehabilitasi sosial ,jaminan sosial, advokasi sosial , bencana alam /sosial.
- Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada BKKKS yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); dan terbentuknya unit

kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Keluaran penataan dan penguatan organisasi di lingkungan BKKKS adalah:

- a. Tersedianya peta tugas dan fungsi kerja pada BKKKS yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- b. Terbentuknya kepengurusan dan unit usaha sebagai kelengkapan organisasi BKKKS yang menangani Subfungsi organisasi, tatalaksana, yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi

2. Data Fokus Penelitian : Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta

- a. Aspek Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta

Aspek Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta merupakan aspek pertama dalam penelitian ini. Aspek Ruang Lingkup Perda Ketertiban Umum

Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dalam rangka penegakkan Kebijakan Kesejahteraan Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta. Maka dari Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta untuk mewujudkan kesejahteraan social yang lebih baik lagi.

b. Aspek Kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta

Makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan. Dalam sebuah organisasi suatu instansi pemerintah peningkatan kinerja oleh Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu mencapai target dalam peningkatan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya apabila instansi pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal.

B. Pembahasan

1. Aspek Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKSd Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta

Visi dari DKI Jakarta dirumuskan dengan “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.

Hal ini senada dikatakan oleh informan penulis yang dalam hal ini menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta yang mengatakan “dimana ada sebuah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta agar terwujudnya masyarakat yang lebih baik lagi dan menjadi new normal kota modern yang tertata rapih, bersih, dan menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public sehingga dalam Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian menurut ketua BKKKS DKI Jakarta saya selaku ketua Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta berusaha berkomunikasi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat disaat mereka membutuhkan bantuan layanan public yang bersifat darurat apaagi khususnya dalam Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta.

2. Aspek Ruang Lingkup Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 di DKI Jakarta

Definisi ketertiban umum dalam Kebijakan Kesejahteraan Sosial mendefinisikan ketertiban umum sebagai suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Dan Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial

(BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 di DKI Jakarta, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya new normal kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram.

Key informan dalam hal ini selaku ketua BKKKS DKI Jakarta penulis mengatakan:

“Perda ketertiban umum ini mempunyai posisi peran yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan new kota Jakarta baru yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat pasca Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta.”

3. Aspek Kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta

Makna kinerja menunjukan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan. Dalam sebuah organisasi suatu instansi pemerintah peningkatan kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan agar instansi lembaga tersebut mampu mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta tersebut akan berhasil apabila instansi lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya apabila instansi lembaga tersebut tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal. Faktor yang mampu mempengaruhi kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan

Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta yaitu kedisiplinan dan pengawasan. disiplin adalah menjamin ketertiban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga semua pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal kedisiplinan juga perlu adanya pengawasan, dimana dalam pengawasan tersebut akan tercipta tindakan preventif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam terciptanya kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta yang optimal. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Seperti yang terjadi di Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta ini dimana kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta dalam pembinaan dan penataan new normal kota Jakarta didalamnya harus terdapat kedisiplinan dan pengawasan.

Key informan penulis mengatakan:

“kedisiplinan adalah kunci utama keberhasilan, Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta harus selalu mengedepankan sikap disiplin karena mereka bekerja untuk mendisiplinkan masyarakat dalam kehidupan new normal Di Era Pandemi Covid 19 di DKI Jakarta.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Arah Kebijakan

Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta dinyatakan sudah baik.

2. Aspek Ruang Lingkup Kebijakan

Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta untuk menjadi new norma kota layak huni dan modern akan terwujud secara bertahap.

3. Aspek Kinerja

Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan normal kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat

B. Saran

Berkaitan dengan rumusan kesimpulan dan berdasarkan temuan penulis maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Aspek Arah Kebijakan

Diharapkan arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta bisa memberikan solusi terbaik untuk pembangunan new kota Jakarta

2. Aspek Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta diharapkan mampu untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan new normal kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

3. Aspek Kinerja BKKKS

- a. Faktor yang mampu mempengaruhi kinerja Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Di Era Pandemi Covid 19 Di DKI Jakarta yaitu kedisiplinan dan pengawasan. disiplin adalah menjamin ketertiban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga semua pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mendapatkan hasil kerja yang

optimal kedisiplinan juga perlu adanya pengawasan, dimana dalam pengawasan tersebut akan tercipta tindakan preventif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam terciptanya kinerja BKKKS yang optimal Di Era Pandemi Covid 19.